

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu sektor yang terkena dampak dari berbagai perubahan struktur ekonomi Indonesia akibat pandemi *Covid-19* adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya usaha mikro. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melaporkan bahwa terdapat 65,4 juta UMKM di Indonesia pada tahun 2019. Pemerintah Republik Indonesia telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada UMKM sebagai bentuk dukungan. Data dari Kementerian Usaha Kecil dan Menengah menunjukkan bahwa pada tahun 2020, pertumbuhan KUR sebesar Rp 178,07 triliun, atau sekitar 16,25%, dan pada tahun 2021, sebesar Rp 192,59 triliun, atau sekitar 8,16%. Hal ini semakin menunjukkan perlunya investasi modal bagi para pelaku usaha UMKM untuk mengembangkan usaha mereka.

Pertumbuhan UMKM memiliki kebutuhan yang signifikan akan modal usaha. UMKM sering kali menghadapi kegagalan dalam mengelola dan mengembangkan usaha mereka, terutama usaha mikro, kapasitas mereka untuk berkontribusi secara strategis terhadap pertumbuhan ekonomi nasional tidak selalu berhubungan dengan keberhasilan mereka dalam mengoperasikan usaha mikro. Kemampuan sebuah usaha untuk bertahan dalam persaingan merupakan salah satu ukuran keberhasilannya. Sebuah usaha dapat bertahan dengan melakukan berbagai cara, termasuk mengelola keuangan, melakukan promosi, meningkatkan standar kualitas, dan mengelola tenaga kerja. Pemilik usaha mikro mengabaikan pentingnya manajemen keuangan, yang menyebabkan kesulitan

dalam pengelolaan keuangan di usaha-usaha tersebut (Ardila & Christiana, 2020).

Industri kreatif berupa usaha mikro, dan mereka biasanya berfokus pada waktu dekat saat mengambil keputusan. Hal ini terlihat dari proses usaha utama yang tidak jelas dan kurangnya pendekatan inovasi yang berkelanjutan (Hilmawati & Kusumaningtias, 2021). Pada akhirnya, pelaku usaha di sektor kreatif biasanya memiliki kinerja jangka panjang yang tidak terarah dan tetap (Idawati, 2023). Kinerja dan keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang hanya dapat ditingkatkan dengan menerapkan inisiatif strategis, seperti meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang pengelolaan keuangan dan akuntabilitas dalam mengoperasikan usaha mereka.

Usaha kreatif yang menggunakan batik memiliki kapasitas untuk bersaing di kancah internasional. Menurut Jannah *et al* (2020), batik adalah teknik menghias kain dengan menggunakan lilin atau perintang untuk menutupi area tertentu. Namun, masih ada masalah dalam pengembangan usaha kreatif batik. Menurut Saputri (2021) masalah utama yang dihadapi usaha kecil batik adalah (1) modal (2) bahan baku (3) pemasaran dan (4) administrasi keuangan. Menurut (Budiarto, 2018), memanfaatkan inovasi teknologi dan desain, menata pabrik secara strategis, dan memanfaatkan pemasaran *online* merupakan cara menghindari permasalahan internal yang dialami usaha batik.

Produktivitas yang rendah, akses terbatas ke sumber daya produktif, dan kualitas kelembagaan dan organisasi yang buruk yang menyebabkan kinerja di bawah rata-rata adalah masalah klasik yang dihadapi UMKM (Junedi, 2021). Masalah utama yang dihadapi UMKM adalah masalah internal, seperti sumber daya manusia yang kurang, keahlian organisasi, kompetensi teknologi,

pemasaran, semangat kewirausahaan, dan akses keuangan (Yahya, 2020). Semuanya berkaitan dengan pasar, penggunaan teknologi, keterbatasan informasi, dan kendala-kendala produksi lainnya. UMKM harus menghadapi isu-isu terkini seperti kebebasan perdagangan, perkembangan industri, dan kemajuan teknologi. Banyaknya penawaran produk yang sebanding di berbagai saluran distribusi penjualan menggambarkan persaingan perusahaan yang ketat (Nurpratama, 2020). Dengan menjamurnya media sosial, *e-commerce*, ritel konvensional, dan ritel modern, para pelaku usaha harus memastikan keberlangsungan usahanya agar dapat terus berkembang.

Disisi lain, dibutuhkan waktu bagi sebuah bisnis yang inovatif untuk berkembang dari usaha kecil menjadi usaha menengah dan akhirnya menjadi usaha besar. Pelaku usaha harus mengatasi berbagai tantangan dan masalah yang berkaitan dengan pendanaan serta masalah non-dana yang mereka hadapi. Hal ini didukung oleh penelitian (Febrian & Kristianti (2020) yang menyatakan bahwa mahalnya bahan baku, kurangnya tenaga kerja terampil, keterbatasan modal, dan kurangnya jaringan untuk pemasaran produk menjadi hambatan utama pertumbuhan UMKM. Suci (2017) membuat pernyataan serupa, yang menyatakan bahwa agar UMKM dapat berhasil, masih ada beberapa masalah yang perlu diselesaikan dan diperkuat. Masalah-masalah ini termasuk pemasaran yang terbatas, ketersediaan modal yang terbatas, dan kurangnya kemampuan pengelolaan dan kemampuan manajemen dalam hal pengorganisasian. Permasalahan muncul sejak wabah *Covid-19* semakin menyebar luas.

Pandemi *Covid-19* membawa perubahan signifikan pada kondisi sosial dan ekonomi, terutama dengan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar

(PSBB) dan kebijakan bekerja dari rumah. Penurunan pendapatan dan mungkin kebangkrutan beberapa pelaku usaha merupakan dampak dari pandemi *Covid-19*. Karena banyak manfaat yang ditawarkan inklusi keuangan digital kepada pelaku usaha, termasuk: Penggunaan mata uang yang perlu dicatat kembali; membuat transaksi dan pencatatan laporan keuangan menjadi lebih sederhana dan dapat langsung dipantau; dan mempermudah akses pembiayaan, karena salah satu syarat pendanaan bagi bank dan lembaga keuangan lainnya adalah pencatatan transaksi yang akurat dan menyeluruh, inklusi keuangan digital menjadi salah satu strategi untuk mengatasi hambatan yang ditimbulkan oleh pandemi *Covid-19* bagi pelaku usaha (Sailendra & Djaddang, 2022). Hal tersebut menekankan bahwa inklusi keuangan sangat penting.

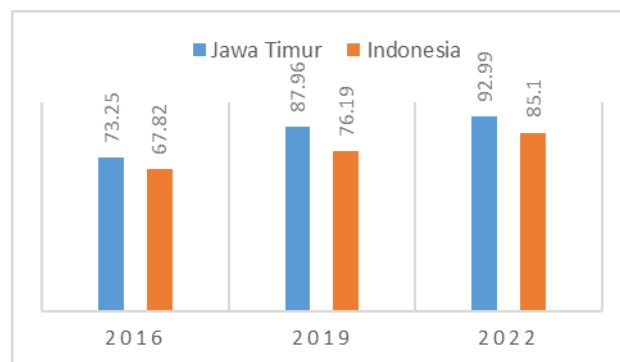
Memahami dan memiliki pengetahuan tentang inklusi keuangan merupakan hal yang sangat penting bagi para pelaku usaha. Hal ini dikarenakan pengelolaan keuangan yang dipengaruhi oleh inklusi keuangan akan mempengaruhi kinerja dan keberlangsungan usaha (Desiyanti, 2016). Oleh karena itu, pelaku usaha harus membuat inisiatif strategis untuk mencapai kinerja yang unggul dan kelangsungan hidup usaha dalam jangka panjang. Inklusi keuangan adalah suatu kondisi di mana setiap individu dalam masyarakat memiliki akses yang tepat waktu, aman, dan terjangkau terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas, sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas masing-masing individu (Wahyuningsih & Widayanti, 2020). Hal ini sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 76/POJK.07/2017, yang menjelaskan bahwa inklusi keuangan didefinisikan sebagai akses terhadap layanan keuangan yang mengutamakan pemenuhan kebutuhan dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan individu. Semua segmen ekonomi suatu

negara dapat tumbuh dan berkembang dengan inklusi keuangan (Alnabulsi & Salameh, 2021). Posisi keuangan pengusaha dapat ditingkatkan dengan investor yang berinvestasi pada ide perusahaan yang dimungkinkan oleh ketersediaan dan pemanfaatan layanan keuangan (Eton M, 2021).

Mengurangi hambatan terhadap layanan keuangan yang disediakan oleh infrastruktur yang ada saat ini dan mendorong penggunaannya merupakan tujuan dari inklusi keuangan. Inklusi dan literasi keuangan adalah konsep penting bagi organisasi untuk memahami dan mengerti. Hal ini dikarenakan pengelolaan keuangan dipengaruhi oleh inklusi dan literasi keuangan, yang pada akhirnya memengaruhi kinerja dan keberlanjutan usaha (Hilmawati & Kusumaningtias, 2021). Untuk mencapai kinerja yang luar biasa dan usaha yang berkelanjutan, diperlukan inisiatif strategis bagi pelaku usaha secara mikro.

Dalam rangka mendukung kegiatan usaha, kebijakan fiskal pemerintah disusun untuk memberikan dorongan modal melalui penyaluran KUR. KUR adalah kredit atau pembiayaan yang ditawarkan oleh bank kepada pelaku usaha yang layak namun belum bankable. Riawan & Kusnawan (2018) menemukan bahwa perubahan biaya produksi, omzet penjualan, dan peningkatan laba merupakan indikator dari fungsi penting KUR dalam meningkatkan kinerja sektor usaha. Ada dua cara untuk menyalurkan KUR: secara langsung dan tidak langsung. Pelaku usaha dan koperasi dapat memperoleh KUR secara langsung dari cabang bank pelaksana melalui penyaluran langsung. Sementara itu, KUR dapat diakses oleh usaha mikro melalui penyaluran tidak langsung melalui KSP/USP koperasi, lembaga keuangan mikro, atau kegiatan terkait lainnya yang dilakukan bersama dengan bank pelaksana.

Tabel ini dibuat untuk memberikan pengetahuan yang komprehensif mengenai keterjangkauan dan penggunaan layanan keuangan di Jawa Timur dibandingkan dengan skala nasional, dengan tujuan untuk menginvestigasi dan mengilustrasikan jangkauan inklusi keuangan. Dengan menyajikan statistik terkini mengenai jumlah orang dan keluarga yang telah berhasil menerima layanan keuangan, data tersebut memberikan gambaran lengkap mengenai kemajuan yang telah dicapai dalam hal inklusi keuangan. Gambar 1.1 berikut menjelaskan hal ini:



Gambar 1. 1 Indeks Perbandingan Inklusi Keuangan Provinsi Jawa Timur dan Indonesia (persen)

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan 2022 (data olah)

Dalam gambar 1.1 penelitian mengenai inklusi keuangan menjadi menarik karena berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2022, tingkat inklusi keuangan diukur secara komprehensif setiap tiga tahun sekali. Hal ini memberikan gambaran mengenai inklusi keuangan khususnya di wilayah Jawa Timur yang pada tahun 2022 sebesar 92,99%, sudah cukup memuaskan dibandingkan nasional sebesar 85,10% dan hasil tersebut lebih tinggi dibandingkan pendapat sebelumnya yang menunjukkan sebesar 87,96% pada tahun 2019 dan 73,25% pada tahun 2016. Walaupun terjadi pertumbuhan,

data tersebut mengindikasikan bahwa masih ada sebagian masyarakat di Jawa Timur yang belum memanfaatkan layanan keuangan.

Salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang menggantungkan kegiatan perekonomiannya pada usaha perdagangan adalah Kabupaten Bangkalan. Di Kabupaten tersebut yang bergerak di bidang industri pembuatan batik cap dan tulis, yaitu Kecamatan Tanjung Bumi terutama Desa Tanjung Bumi. Karena pengetahuan tentang batik diwariskan secara turun-temurun, tidak mengherankan jika sebagian besar penduduk setempat, khususnya di Desa Tanjung Bumi, mahir dalam seni membatik. Setiap desain dan corak memiliki keunikan tersendiri (Hoiriyah & Kurniasari, 2023).

Berdasarkan hasil survei Dewi & Rahayuningsih (2022) usaha mikro batik Desa Tanjung Bumi menghadapi beberapa masalah sebagai dampak dari pandemi. 1) Tingkat daya beli masyarakat menurun; 2) Berkurangnya kunjungan akibat *Covid-19*. Industri pariwisata merupakan salah satu dari beberapa industri yang terkena dampak dari wabah *Covid-19*; 3) keterbatasan pemenuhan bahan baku. Berikut ini adalah bahan-bahan yang dibutuhkan untuk produksi: 4) Pemasaran dan penjualan batik mengalami penurunan; 5) Keterbatasan modal. Masalah-masalah ini dapat diatasi dengan mengorganisir dan menciptakan perencanaan serta pengembangan.

Desa Tanjung Bumi memiliki potensi yang sangat besar sebagai titik awal pertumbuhan usaha mikro melalui perencanaan, pelatihan, dan pengembangan pelaku usaha dan individu kreatif serta fasilitasi manajemen pemasaran yang memungkinkan produk kreatif memiliki harga yang kompetitif, kualitas tinggi, dan nilai tambah di pasar. Potensi batik masyarakat Tanjung Bumi perlu diseimbangkan dengan kondisi ekonomi mereka saat ini (Wati, 2017). Satu-

satunya industri yang menawarkan kesempatan kerja bagi individu di Madura adalah industri batik (Ghozali *et al.*, 2017). Menurut (Baskoro *et al.*, 2016), perluasan industri batik Tanjung Bumi memiliki potensi untuk meningkatkan tingkat pendapatan penduduk setempat dan mendorong stabilitas ekonomi yang kuat. Tidak hanya berpotensi meningkatkan pendapatan penduduk setempat, tetapi juga secara langsung terkait dengan permodalan dan pemasaran sebagai dua bidang minat utama dalam pengembangan industri batik di wilayah tersebut.

Dua bidang utama yang menjadi perhatian utama bagi keberlangsungan usaha mikro Batik Tanjung Bumi adalah modal dan pemasaran. Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menerapkan model keuangan inklusif (Irmawati *et al.*, 2013). Inklusi keuangan memiliki potensi untuk mendukung keberlangsungan usaha jangka panjang sektor UMKM, menurut Nurohman *et al* (2021) Para pelaku usaha yang merupakan pemangku kepentingan harus memahami dan memiliki pemahaman tentang inklusi keuangan dan literasi keuangan. Hal ini bertujuan agar pengelolaan keuangan yang dipengaruhi oleh inklusi keuangan dan literasi keuangan dapat berdampak pada kinerja dan keberlanjutan usaha. Jika manajemen keuangan usaha memiliki informasi yang baik dan sadar akan keuangan, maka usaha dapat beroperasi dengan efisiensi yang maksimal.

Keberadaan lembaga keuangan menjadi sangat penting bagi tata kelola usaha di Desa Tanjung Bumi, terutama dalam hal industri batik, yang merupakan landasan dari warisan budaya masyarakat yang turun temurun. Lembaga keuangan ini membantu pengusaha lokal mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dengan berperan sebagai mitra strategis selain sebagai sumber daya keuangan. Lembaga keuangan sangat penting dalam membantu para

pelaku usaha dengan menawarkan pinjaman modal dan bentuk dukungan keuangan lainnya (Aryanti *et al.*, 2022). Melalui inisiatifnya, lembaga ini mempermudah pemilik usaha batik untuk mendapatkan pendanaan yang mereka butuhkan untuk meningkatkan hasil produksi, memperluas basis konsumen, dan menciptakan produk yang inovatif.

Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Buleleng oleh Sugita & Sinarwati (2022) sejumlah UMKM hanya menjalankan operasinya tanpa membuat rencana untuk pengembangan usaha di masa depan sebagai akibat dari rendahnya inklusi keuangan para pelaku UMKM. Kabupaten Buleleng masih memiliki banyak pengelola UMKM yang kurang memiliki keahlian keuangan, yang membuat mereka tidak percaya diri saat memutuskan bagaimana menggunakan uang mereka sendiri untuk pengembangan perusahaan. Dalam studi mereka tentang kemampuan pemasaran, Olii & Nanggong (2022) menemukan bahwa UMKM dengan karakteristik inklusi keuangan-seperti kepemilikan rekening, bantuan pendanaan, dan ketersediaan kredit-memiliki implikasi untuk meningkatkan kemampuan pemasaran UMKM, yang mencakup diversifikasi lini produk, segmen pasar, strategi penetapan harga, distribusi, dan promosi, dibandingkan dengan UMKM yang tidak memiliki karakteristik tersebut.

Menurut Muna H. *et al* (2023) pelaku usaha UMKM di Desa Wado semakin sering menggunakan dan mengakses layanan keuangan (inklusi), berarti pengelolaan keuangan mereka semakin baik dengan bantuan layanan keuangan yang diberikan oleh lembaga keuangan, baik dari sisi fasilitas layanan keuangan, biaya pemeliharaan rekening yang terjangkau, dan kemudahan akses terhadap lokasi, layanan, dan teknologi keuangan yang disediakan. Dengan demikian, diharapkan usaha UMKM di Desa Wado akan semakin maju dan menghasilkan

lebih banyak uang. Salah satu program pemerintah dan sektor keuangan yang membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi adalah inklusi keuangan; sehingga sangat penting untuk menyediakan akses yang mudah bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha, untuk mendapatkan produk dan layanan perbankan agar mereka dapat menggunakannya untuk mendukung keberlangsungan usaha mereka, seperti meminjam modal usaha atau kredit (J. Anggraeni & Arisa, 2022). Para peneliti merasa bahwa inklusi keuangan dalam usaha sangat penting mengingat hal ini. Oleh karena itu, ruang lingkup penelitian ini dibatasi untuk mengkaji bagaimana pengaruh inklusi keuangan terhadap keberlangsungan usaha mikro, termasuk di dalamnya pemasaran, pemanfaatan kredit modal, dan akses perbankan.

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang telah peneliti lakukan terlihat banyak sekali lembaga keuangan Bank seperti Bank Jatim, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Central Asia (BCA) dan terlihat juga lembaga keuangan non-bank seperti BMT NU Jawa Timur. Namun, hasil penelitian pendahuluan menunjukkan bahwa pelaku usaha cenderung jarang menggunakan layanan lembaga keuangan. Mereka lebih mengandalkan modal sendiri tanpa merencanakan pengembangan usaha di masa depan. Kebijakan suku bunga yang dianggap terlalu tinggi, serta beberapa syarat dan ketentuan mungkin terlalu berat atau sulit dipenuhi oleh pelaku usaha, sehingga mereka mencari opsi pembiayaan alternatif yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya mereka. Selain itu, kurangnya penerapan teknologi juga membuat produk batik dari usaha mikro kurang mampu bersaing dengan produk sejenis di pasaran. Berikut beberapa gambar lembaga keuangan yang ada di Kecamatan Tanjung Bumi.



Bank BRI KCP Tanjung Bumi



Bank BNI KCP Tanjung Bumi



Bank Mandiri KCP Tanjung Bumi



Bank Jatim KCP Tanjung Bumi



Non-Bank BMT NU



Bank BCA KCP Tanjung Bumi

Gambar 1. 2 Lembaga Keuangan Tanjung Bumi

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2024

Dari permasalahan isu-isu yang sudah di uraikan, penelitian ini menjadi penting karena inklusi keuangan menjadi faktor utama dalam sebuah usaha seperti peminjaman modal atau KUR. modal usaha yang dimiliki menentukan produktivitas karena besar kecilnya modal akan berdampak pada dapat tidaknya

usaha berjalan. Dengan kata lain modal usaha akan mempengaruhi dapat tidaknya kegiatan usaha dijalankan (Junedi, 2021). Pentingnya pengetahuan tentang permodalan dalam sebuah usaha, menjadi pertimbangan penting agar modal usaha dapat berputar dengan baik. Namun, masalah umum yang masih dialami oleh pelaku usaha, yakni usaha terhambat akibat perputaran modal yang lambat (Azzahra, 2021). Dampaknya jika inklusi keuangan tidak ada maka sebuah usaha akan berjalan dengan lambat dan sulit berkembang karena keterbatasan modal, pelaku usaha mungkin kesulitan untuk melakukan inovasi atau pengembangan produk baru, yang dapat mengurangi daya saing mereka dalam jangka panjang. Sehingga peneliti mengambil judul “Makna Inklusi Keuangan Pada Keberlangsungan Usaha Mikro Batik di Desa Tanjung Bumi Bangkalan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka perumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana makna inklusi keuangan pada keberlangsungan usaha mikro Batik di desa Tanjung Bumi Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian untuk mengidentifikasi dan analisis makna inklusi keuangan pada keberlangsungan usaha mikro Batik di desa Tanjung Bumi Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis: hasil penelitian diharapkan dapat mengembangkan konsep/teoritis terkait pada teori/konsep ekonomi moneter khususnya

terkait inklusi keuangan. Dan penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai referensi bagi penelitian yang akan datang.

2. Manfaat praktis: hasil penelitian diharapkan menjadi bahan rekomendasi bagi pemilik usaha batik di desa Tanjung Bumi terkait inklusi keuangan terhadap akses layanan keuangan kredit dan layanan lainnya dengan tujuan berkelanjutan usaha mereka.